

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI  
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD  
GOVERNANCE* PADA DESA LAWANG AGUNG DAN DESA  
KARANG WARUDI KECAMATAN RUPIT  
KABUPATEN MURATARA**

**Skripsi**



**Nama : Andi Hendrawan**

**NIM : 222015226**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**Skripsi**

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI  
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD  
GOVERNANCE* PADA DESA LAWANG AGUNG DAN DESA  
KARANG WARU DI KECAMATAN RUPIT  
KABUPATEN MURATARA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Andi Hendrawan**

**NIM : 222015226**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Hendrawan

NIM : 222015226

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2020

Yang membuat Pernyataan



Andi Hendrawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi  
Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan *Good  
Governance* pada 4 Desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten  
MURATARA.  
Nama : Andi Hendrawan  
NIM : 222015226  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

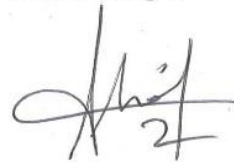
Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Maret 2020

Pembimbing I



**Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si**  
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Pembimbing II



**Anggrelia Afrida, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM : 0218048403

Mengetahui  
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM : 0216109602/944806

## PERSEMBAHAN & MOTTO

Motto:

- Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersabda : Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud)
- Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu adalah belajar dengan tenang dan sabar (Umar Bin Khattab)
- Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan (Imam Ghazali)
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah : 6)

Dengan Rahmat dan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

Kupersembahkan kepada :

- Mama dan Papa
- Pembimbing Skripsiku
- Adik-Adik Tingkat
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Kelas Paket 16
- Almamaterku

## PRAKATA

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.** Alhamdulillah rabbi 'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul "Analisis Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA" penulis bersyukur dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagaimana waktu yang dijadwalkan. Adapun penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab berturut-turut, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 tentang hasil dan pembahasan dan bab 5 tentang simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada Mamaku Fitriawati dan Papaku Abeng Toni yang tak pernah henti selalu memberikan doa menguatkan dan memberi semangat baik moril dan materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Rosalina Ghazali, SE. AK., M.Si yang telah membimbing, memberikan bimbingan dan memberikan saran serta masukan yang tulus dan ikhlas guna menyelesaikan skripsi ini, selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli.SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H.Fauzi Ridwan MM. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE. Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina SE. M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Aprianto SE. M.Si sebagai pembimbing akademik
5. Ibu Rosalina Ghazali, SE. Ak., M.Si dan Ibu Anggrelia Afrida SE. M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf di kantor Camat Rupit dan perangkat desa di Kecamatan Rupit yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya

8. Teman-teman paket kelas 16

9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

**Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamu'aisiaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Palembang,

2020

**Andi Hendrawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Desa.....	9
2. Pengertian Dana Desa.....	10
3. Pengelolaan Dana Desa.....	10
a. Tahap Perencanaan.....	10
b. Tahap Pelaksanaan.....	11
c. Tahap Penatausahaan.....	12
d. Tahap Pelaporan.....	12
e. Tahap Pertanggungjawaban.....	13
f. Tahap Pengawasan.....	14



4. <i>Good Governance</i> .....	14
a. Participation.....	15
b. Rule Of Law.....	15
c. Transparency.....	15
d. Responsiveness.....	15
e. Consensus Orientation.....	16
f. Equity.....	16
g. Efficiency and Effectiveness.....	16
h. Accountability.....	16
i. Strategic Vision.....	16
5. Akuntabilitas (Accountability).....	17
a. Definisi Akuntabilitas.....	17
b. Macam-Macam Akuntabilitas.....	17
1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.....	17
2) Akuntabilitas Manajerial.....	17
3) Akuntabilitas Program.....	17
4) Akuntabilitas Kebijakan.....	18
5) Akuntabilitas Finansial.....	18
c. Dimensi Akuntabilitas.....	19
6. Transparansi/Keterbukaan ( <i>Transparency</i> ).....	20
a. Informatif.....	21
b. Keterbukaan.....	21
c. Pengungkapan.....	22
7. Partisipasi (Participation).....	22
a. Pengambilan Keputusan.....	22
b. Pelaksanaan.....	22
c. Pengambilan Manfaat.....	23
d. Evaluasi.....	23
B. Penelitian Sebelumnya.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN.....28**

A. Jenis Penelitian.....	28
1. Penelitian Deskriptif.....	28
2. Penelitian Komparatif.....	28
3. Penelitian Asosiatif.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel.....	29
D. Data Yang Digunakan.....	31
1. Data Primer.....	31

2. Data Sekunder.....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	31
1. Wawancara.....	31
2. Kuesioner.....	32
3. Observasi.....	32
4. Dokumentasi.....	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	32
1. Analisis Data.....	32
2. Teknik Analisis.....	33

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....34**

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.....	34
2. Letak Geografis.....	34
3. Visi dan Misi.....	35
4. Dasar Hukum.....	36
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	36
6. Penduduk.....	37
7. Struktur Organisasi Kecamatan Rupit.....	37
8. Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
9. Gambaran Karakteristik Responden.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	49
a. Variabel Akuntabilitas.....	49
b. Variabel Transparansi.....	56
c. Variabel Partisipasi.....	63
d. Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	68
2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
a. Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada 4 Desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.....	73
b. Analisis Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada 4 Desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.....	76
c. Analisis Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada 4 Desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.....	78
d. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap	

Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada 4 Desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.....	80
--	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk.....	6
Tabel I.2 Alokasi Dana Desa.....	6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel III.1 Daftar Kantor Desa di Kecamatan Rupit.....	29
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV.1 Gambaran Karakteristik Responden.....	46
Tabel IV.2 Rekapitulasi Jawaban kuesioner indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.....	49
Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner indikator Akuntabilitas Manajerial.....	51
Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban kuesioner indikator Akuntabilitas Program.....	52
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban kuesioner indikator Akuntabilitas Kebijakan.....	54
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Finansial.....	55
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Informatif.....	56
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterbukaan.....	58
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengungkapan.....	59
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Ketersediaan Informasi Yang Jelas.....	60
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterlibatan Masyarakat.....	61
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Proses Pengelolaan.....	62
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterbukaan Informasi.....	62
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengambilan Keputusan.....	63
Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pelaksanaan.....	65
Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengambilan Manfaat.....	66

Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Evaluasi.....	67
Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Perencanaan.....	68
Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pelaksanaan.....	69
Tabel IV.20 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penatausahaan.....	70
Tabel IV.21 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pelaporan.....	71
Tabel IV.22 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pertanggungjawaban.....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Alokasi Dana Desa

Lampiran 2 Surat Selesai Riset di Kecamatan Rupit

Lampiran 3 Lembar Kuesioner

Lampiran 4 Lembar Rekapitulasi Responden

Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surah Pendek)

Lampiran 7 Sertifikat Toefl

Lampiran 8 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 9 Foto Responden Dan Tempat Penelitian

Lampiran 10 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Andi Hendrawan/222015226/2019/Analisis Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA/ Akuntansi Sektor Publik.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam mengelola Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA. Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam mengelola Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa. Tempat dalam penelitian ini yaitu 4 desa di Kecamatan Rupit, dengan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 85 responden yaitu 6 orang perangkat desa dan 16 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 4 desa di Kecamatan Rupit, disimpulkan bahwa tahap Perencanaan di 4 desa telah menerapkan prinsip Transparansi dan Partisipasi sedangkan variable Akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman. Adapun variable Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi cukup baik dalam mengelola Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 Desa di Kecamatan Rupit.

Kata Kunci : pengelolaan dana desa. Akuntabilitas. transparansi, partisipasi. *Good Governance*

## **ABSTRACT**

**AndiHendrawan/222015226/2019/ Analysis of Accountabiitiy, Transparency, Participation in Village Fund Management using Good Governance approaches in 4 Villages in Rupit District, MURATARA Regency / Public Sector Accounting.**

*The formulation of the problem in this study is How is the application of the principle of Accountability, Transparency and Participation in managing village funds using the Good Governance approach in 4 villages in Rupit District, MURATARA Regency. The aim is to find out the application Accountability, Transparency and Participation in managing village funds by approach Good Governance in 4 villages in Rupit District, MURATARA Regency. This type of research is descriptive research. This research was conducted in 4 villages in Rupit District, MURATARA Regency. The variables in this study are Accountability, Transparency and Participation village fund management. The places in this study are 4 villages in Rupit District, the number of respondents returning the questionnaire was 85 respondents, 6 people village officials and 16 village people. The data used are primary and secondary data with data collection techniques using questionnaires and documentation. Based on the results of research that has been conducted on all data obtained in 4 villages in Rupit District, it was concluded that the planning stage in 4 villages had applied the principle of Transparency and Participation, while the Accountability variable was not reported to the public in the form of an announcement board. The variable Accountability, Transparency and Participation are quite good in managing village funds with the good governance approach in 4 villages in Rupit District.*

*Keywords: village fund management. Accountability, Transparency and Participation. Good Governance*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pemerintahan di Indonesia berkembang pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi atas pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa terelakkan lagi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam undang-undang desa juga terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Mengembangkan dan membangun desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus bisa memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

*Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *united nation development program* (UNDP) mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*” (Mardiasmo, 2009: 17).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa maka pemerintah mengeluarkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa yaitu azas-azas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Partisipasi (*participation*) dalam hal ini adalah bersama hak dalam mengambil semua keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Kata

kunci dalam pembangunan demokratis adalah partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda pada titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti member ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok-kelompok masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil dan perempuan.

Pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegak hukum (Mardiasmo, 2009: 18). Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Ketiga prinsip

*good governance* tersebut sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (V. Wiratna, 2015: 27).

Kabupaten MURATARA adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas yang diresmikan dengan UU No. 16 Tahun 2013. Luas Kabupaten MURATARA adalah 6.008,55 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk sebesar 32 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya sebesar 189.910 jiwa. Sedangkan penduduk yang beragama Islam di Kabupaten MURATARA berjumlah 188.258 orang (99,13%), Katholik 57 orang (0,03%), Hindu 1.557 orang (0,82%), dan Protestan 38 orang (0,02%). Kabupaten MURATARA memiliki 7 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Rupit. Kecamatan Rupit adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten MURATARA, kecamatan ini mempunyai luas wilayah 409,7573 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 36.696 jiwa dengan rincian laki-laki = 17.802 jiwa (49,9%) dan perempuan = 17.894 jiwa (50,1%). Kecamatan Rupit memiliki 16 Desa, dari 16 Desa tersebut ada 4 desa yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Lawang Agung, Desa Karang Waru, Desa Lubuk Rumbai dan Desa Pantai.

**Tabel I.1**  
**Data Jumlah Penduduk**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Kartu Keluarga (KK)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Lawang Agung	1.768	5.770
2	Karang Waru	1.655	4.310
	Jumlah	3.423	10.080

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel I.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di dua desa di Kecamatan Rupit 10.080 jiwa. Mata pencaharian pada ke dua desa ini mayoritas penduduknya adalah petani dan toko kelontong. Hampir rata-rata tingkat pendidikan setiap desa cukup rendah.

**Tabel I.2**  
**Alokasi Dana Desa pada dua desa di Kecamatan**  
**Rupit Kabupaten MURATARA**  
**Tahun 2019-2020**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alokasi Dana Desa (Dalam Rp)</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Lawang Agung	664.283.000	641.828.000
4	Karang Waru	549.443.000	544.388.000
	Jumlah	1.213.726.000	1.186.216.000

Sumber : Kantor Camat Rupit, 2019

Tabel I.2 menunjukkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa pada setiap desa mengalami penurunan, dikarenakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan keterlambatan tidak baik, penurunan tersebut disebabkan juga adanya perubahan komposisi dan formulasi dalam pengalokasian Dana Desa secara nasional. Perangkat desa juga belum memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk mengelola dana desa, sehingga pembangunan desa tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel.

Fenomena Desa Lawang Agung dan Desa Karang Waru di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA ;

- Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) : hanya kepada Camat dan tidak adanya papan pengumuman informasi tentang Dana Desa. Dana Desa yang didapatkan dari APBN digunakan untuk keperluan pribadi; pembangunan ruko untuk sarang burung walet dan pembelian kebun atau tanah serta mobil.
- Transparansi (Keterbukaan) : tidak adanya keterbukaan informasi terhadap pengelolaan Dana Desa dan susah nya mendapatkan informasi tentang Alokasi Dana Desa.
- Partisipasi : Musrengbangdes hanya di ikuti oleh masyarakat sekitar rumah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta kerabat keluarga terdekat Pemerintah Desa.

Dana desa diharapkan dapat membuat desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera, dana desa harus dilaksanakan aparatur desa bersama masyarakat dengan menerapkan prinsip *Good Governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, maka aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Fenomena pengelolaan dana desa merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan artikel dan sumber lainnya menyatakan masih banyak disajikan data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak

penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Rupit. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Lawang Agung dan Desa Karang Waru Di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah penerapan prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Lawang Agung dan Desa Karang Waru Di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Mengelola Dana Desa Untuk Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Lawang Agung dan Desa Karang Waru Di Kecamatan Rupit, Kabupaten MURATARA ?

## **C. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya.



1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman yang lebih baik terutama mengenai azas pengelolaan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perangkat desa dalam melaksanakan azas pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sabusi. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Ade, Irma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254>.
- Farida. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (online), Vol. 4 No. 5. <http://Dokumentasi/mydocument/download/817-3143-1-PB.pdf>.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. CV Alfabeta.
- Titiek Puji Astuti. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Journal BAKI (Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia), (online).Vol. 1 No. 1. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/view/1694>, diakses 31 Maret 2016.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. AkuntansiDesa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- .